

Efek Ratcheting Pada Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur)

Dian Puspitasari^{1*}, Maslichah², Junaidi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: dps534sari@gmail.com

ABSTRACT

Recently, many problems have been found in the public sector, especially in the budgeting process which uses reference to the previous period's performance targets in preparing the budget. This can lead to slack, decreased performance capacity and manipulation of real activities in budgeting or commonly known as the ratcheting effect. This study aims to test whether there is a ratchet effect in the preparation of the income and expenditure budget. The form of this research is correlational with the type of data used as secondary data obtained from the East Java Local Government SKPD Budget Realization Report for the period (2018-2022). The population and sample used in this study were 37 cities/regencies in East Java Province with purposive sampling technique as the sample. The analytical method uses simple linear regression analysis with the results of the study proving that there is a ratchet effect in the preparation of the income and expenditure budget in the Regional Government of East Java Province.

Keywords : Slack, ratchet effect, budget, government budgeting, revenue, local spending

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, penyusunan anggaran pemerintah berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa baik kinerja pemerintah. Kinerja ini dinilai dengan membandingkan anggaran aktual dengan anggaran yang direncanakan. Aturan penyusunan APBD yang dituangkan dalam Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Menurut Leone dan Rock (2002), *ratcheting* adalah bentuk perilaku informasi yang simetris. Efek ratcheting akan terwujud ketika kepala sekolah menetapkan tujuan melalui proses kinerja periode sebelumnya sebagai akibat dari masalah insentif yang dinamis dalam konteks hubungan keagenan. Indeks bias digunakan oleh kepala sekolah di Texas saat membuat anggaran sekolah, menurut penelitian dari Lee dan Plummer (2007). Dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, Sari (2020) menemukan bahwa *Ratcheting* terjadi pada saat pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan kata lain, efek *ratcheting* adalah pertumbuhan bertahap penjelasan anggaran dari waktu ke waktu, kira-kira mengikuti norma klasik. Provinsi terbesar di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Timur yang juga memiliki banyak hal yang ditawarkan dari segi keindahan alam, keragaman suku, dan budaya. Ini juga memiliki sejarah pencapaian yang panjang. Dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5 poin, 24 persen, kinerja ekonomi Jatim II pada triwulan 2022 membaik. Stimulus kebijakan yang berkelanjutan, seperti insentif keuangan untuk UMKM dan korporasi, berkontribusi pada pertumbuhan mayoritas LU di Jawa Timur. penerapan PMK No. 134/PMK. Untuk mengelola dampak inflasi tahun anggaran 2022, belanja wajib harus dimulai dari subsidi transportasi, khususnya subsidi penyeberangan, subsidi bus Trans Jawa Timur, subsidi angkutan petani, subsidi Ojol, subsidi UMKM, subsidi Token Listrik, subsidi Pasar Murah, dan subsidi nelayan dengan data di luar DTKS. Total anggaran belanja pemerintah daerah Jawa Timur tahun 2018 sebesar Rp134,26 triliun. Pada tahun 2022 meningkat sebesar 21,22 poin sebesar 2 persen dari pagu anggaran tahun sebelumnya.

Anggaran pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur seringkali tidak sesuai dengan proyeksi, sedangkan anggaran belanja yang direncanakan biasanya berkisar antara 68 dan 80 persen dari belanja aktual. Ini mungkin berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik diperlukan untuk mencapai realisasi anggaran. Cakupan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji efektivitas penganggaran berbasis kinerja yang dapat mengurangi terjadinya bias dalam perilaku penganggaran pemerintah berupa *ratchet effect*.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, dilakukan penelitian dengan judul “ **Efek Ratcheting pada Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur)**”.

TINJAUAN TEORI

Pengertian APBD Secara Umum

Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun kepala daerah dengan persetujuan DPRD selama satu tahun. Dapat juga dikatakan bahwa APBD merupakan database yang memuat informasi pendapatan dan pengembangan dana anggaran selama satu tahun.

Tujuan dan Fungsi APBD

Tujuan APBD adalah untuk membantu pemerintah melacak pengeluaran dan penerimaan selama satu tahun. Tujuan APBD lainnya adalah menjadi pemimpin, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi jumlah dana yang tidak terdeteksi lainnya. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi APBD menurut Undang- Undang No. 33 Tahun 2003 Pasal 66 yaitu :

1. Fungsi otorisasi merupakan dasar pemerintah daerah untuk menghitung pendapatan belanja dalam 1 tahun.
2. Fungsi Perencanaan adalah pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan.
3. Fungsi Pengawasan terdiri dari gerakan, pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi perekonomian.
4. Fungsi Distribusi berfungsi dalam pendistribusian dengan mengutamakan kualitas dan efisiensi.

Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan adalah pendapatan yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Komponen Pendapatan meliputi :

a. PAD

PAD (Pendapatan Asli Daerah), yaitu pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang dihasilkan dari pungutan daerah, dan semua hak yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih selama periode tertentu di daerah, dengan tujuan memberikan keleluasaan pendanaan dalam pengelolaan daerah sendiri (otonomi daerah). Jenis – jenis PAD adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak Daerah.
 - Pendapatan Retribusi Daerah.
 - Lain-Lain PAD yang Sah.
 - Pendapatan dari Pengembalian.
- b. Dana perimbangan adalah suatu cara pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pengalokasian dana dalam bentuk anggaran. Delegasi sejumlah anggaran untuk tujuan tertentu dikenal sebagai alokasi dana. Pelimpahan dana perimbangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daerah akan dana kegiatan dan program. Jenis- Jenis dana perimbangan yaitu :
- Dana Alokasi Umum (DAU),

- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Dana Bagi Hasil (DBH)
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Lain- lain pendapatan yang sah meliputi :
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - Jasa giro, pendapatan bunga;
 - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1. Pengeluaran daerah dibagi menjadi dua kategori: wajib dan opsional. Pengeluaran untuk penyelenggaraan urusan harus diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Belanja daerah terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Belanja Langsung
Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- b. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak langsung berkaitan dengan program pemerintah daerah.
Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai., belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga.

Agency Theory

Agency Theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana kontra antara prinsipal dan agen. Prinsipal disini adalah pihak yang memberi perencanaan, mengatur dan mengambil keputusan terhadap agen dan saling bekerjasama dalam melaksanakan tujuan tersebut. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan informasi terkait dengan sesuatu yang telah dijanjikan tersebut kepada masyarakat. Setyaningrum & Syafitri (2012) menyatakan bahwa dengan adanya hubungan keagenan tersebut akan menimbulkan masalah asimetri informasi dimana pihak agen atau pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak prinsipal atau masyarakat, bahkan banyaknya informasi di pihak pemerintah, tidak semua yang dinyatakan dengan benar. Persoalan ini semakin menjadi nyata ketika masyarakat tidak memiliki saran atau institusi formal untuk mengawasi kinerja pihak agen agar bisa dikontrol dengan baik, sehingga perilaku moral hazard dapat terjadi dengan mudah.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia

Di Indonesia, upaya selalu dilakukan untuk memperbaiki proses penganggaran pemerintah, seperti penerapan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan kriteria evaluasi kinerja dilakukan untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di tingkat kementerian negara, lembaga, atau perangkat daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan Tahunan (LAKIP), disusul Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Evaluasi Pemerintahan Daerah.

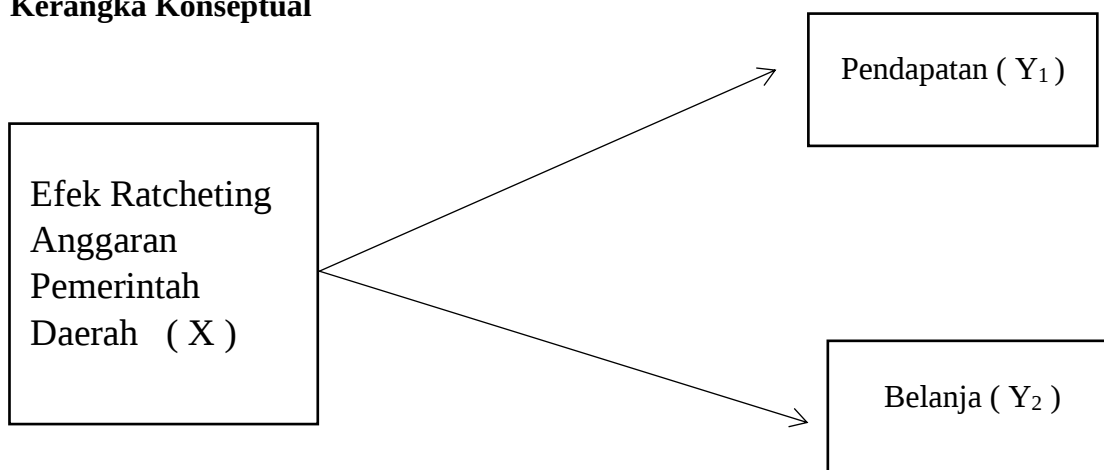
Penyusunan peraturan daerah yang memberikan legitimasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode anggaran.

Efek Ratcheting Dalam Penyusunan Anggaran Daerah

Efek *ratcheting*, yang terjadi ketika target tahun berjalan dipengaruhi oleh perbedaan antara kinerja tahun lalu dan targetnya, merupakan aspek pervasif dari penetapan target (Aranda, Arellano, dan Davila, 2010). *Ratcheting*, menurut Leone dan Rock (2012), adalah bentuk perilaku informasi yang simetris. Hal ini disebabkan oleh ketidaksamaan informasi antara prinsipal dan agen. Perilaku yang tidak stabil akan menghasilkan perilaku dalam hubungan keagenan yang biasa disebut dengan *ratcheting effect*.

Akibat dari masalah insentif yang dinamis dalam konteks hubungan keagenan, efek *ratcheting* akan muncul ketika kepala sekolah menetapkan tujuan melalui proses kinerja periode sebelumnya. Data kinerja periode sebelumnya digunakan oleh kepala sekolah untuk menetapkan sasaran anggaran dan mencapai kinerja yang akan menimbulkan penurunan kapasitas kinerja dan bisa menciptakan kesenjangan *slack* dalam manipulasi aktivitas penganggaran. (Bouwens dan Kroos, 2011).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HIPOTESIS

Sugiyono (2013: 96) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah tersebut dinyatakan sebagai bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diutarakan berdasarkan teori.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: efek *ratchet* berpengaruh terhadap anggaran pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

H₂: efek *ratchet* berpengaruh terhadap anggaran belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian adalah penelitian korelasional. Metode penelitian korelasional adalah non-eksperimental di mana seorang peneliti mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan statistik yang dapat mengukur pengaruh antar dua variabel atau lebih dengan

tujuan untuk mengetahui sejauh mana variasi variabel berkaitan dengan variabel lainnya. (Creswell, 2022)

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam Penelitian ini adalah Seluruh SKPD yang ada di Provinsi Jawa Timur sebesar 38 Kota/Kabupaten. Sampel dalam penelitian ini adalah 37 Kota/Kab di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki Komponen lengkap data Pendapatan dan Komponen Belanja Daerah.
2. Merupakan data APBD terbaru atau pembaharuan terakhir.

Dari kriteria tersebut diperoleh 28 Kabupaten yang memiliki komponen pendapatan dan 9 Kota yang memiliki komponen Belanja Daerah.

Definisi Operasional Variabel

Variabel-Variabel dalam penelitian ini terdiri dari efek *ratcheting* sebagai variabel independen (X), Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y).

Definisi dan pengukuran masing-masing variabel yaitu :

1. Efek *Ratcheting*

Efek Ratcheting merupakan fenomena perilaku moral hazard yang seringkali bermanifestasi sebagai bias hubungan keagenan antara prinsipal dan agen, yang dapat menciptakan kesenjangan dan menciptakan *slack* dalam penganggaran. Model dari Aranda et al. (2010), yang memiliki rumus sebagai berikut, digunakan untuk mengukur variabel ini.

$$PAD_t - PAD_{t-1} = \theta + \gamma (PADR_{t-1} - PAD_{t-1}) + \varepsilon_t$$

Keterangan :

PAD_t adalah anggaran tahun sekarang

PAD_{t-1} adalah anggaran sebelumnya

θ adalah Konstanta

γ adalah koefisiensi regresi

$PADR_{t-1}$ adalah realisasi PAD tahun t-1

ε_t adalah error terms

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pengukuran variabel ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu :

$$PD = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

3. Belanja Daerah

Anggaran Belanja adalah proses anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Anggaran Belanja Daerah diukur dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu :

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tak Terduga}$$

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi.

Peneliti mengambil dokumen dari website (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) dan melalui Direktorat Kantor Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2018– 2022.

Metode Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dengan pengolahan menggunakan SPSS 22, hasil pengujian secara normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Adapun syarat untuk menyatakan bahwa adanya efek ratcheting dalam anggaran daerah yang berdasarkan rancangan pengujian hipotesis dengan ketentuan $y \neq 0$. (Marlina, 2019).

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan	185	69.54	980.78	350.1308	198.06451
Belanja	185	97.05	2503.91	1452.5112	499.81346
Racheting	185	1175.90	1246.51	1208.9120	5.20244
Valid N (listwise)	185				

Sumber : Data diolah

Hasil analisis statistik Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun APBD meningkat rata-rata 11% selama periode berjalan, rata-rata anggaran pendapatan setiap periode meningkat 3,5 persen dengan standar deviasi 19,8 persen, seangkan belanja rata rata sebesar 14,5% dengan standar deviasi 49,9% untuk setiap periode. Karena adanya bias anggaran saat menentukan APBD, Susanto dan Halim (2018) menjelaskan bahwa pendapatan lebih rendah (*underforecast*) dari pada belanja. Terlihat dari sisi belanja masih terjadi *underspending*, padahal target kinerja lebih tinggi dari pada saat anggaran sebelumnya direalisasikan atau dicapai. Temuan ini mungkin menunjukkan adanya bias perilaku rachet dan target anggaran berbasis kinerja.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana (Pendapatan)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1980.573	133.271		-14.861	.000
	Ratcheting	.642	.027	.868	23.663	.000
a. Dependent Variable: Pendapatan						

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : Data diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien 1980,573 memiliki arah varian negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah keagenan dalam penetapan anggaran pendapatan daerah, yang dapat dilihat ketika pengusul dan pengesahan anggaran memiliki kepentingan pribadi atau bertindak oportunistik. Karena mendapat respon yang lebih **tinggi** dari perencanaan anggaran sebagai penentu dalam menentukan anggaran periode sekarang dibandingkan varian positif anggaran tahun sebelumnya,

Maka penelitian ini konsisten dengan teori Weitzman (1980), Prinsip *ratchet* adalah cara menggunakan kinerja saat ini untuk menetapkan tujuan atau target di masa depan. Namun, manajer juga dapat menggunakan kinerja saat ini untuk membandingkannya dengan kinerja masa lalu dan menyesuaikan sasaran atau target masa depan pada anggaran tahun sebelumnya. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Susanto dan Halim (2018), yang menemukan bahwa perilaku penganggaran dapat menyebabkan target anggaran pendapatan yang lebih tinggi untuk tahun berjalan, yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari kapasitas fiskal aktual di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana (Belanja)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1904.748	96.325		19.774	.000
	Ratcheting	.746	.038	.825	19.759	.000

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 3 nilai koefisien adalah 1904,748 dan bernilai ke arah positif. Mengingat hal ini, *ratcheting* terbukti. Penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Leone dan Rock (2001), bahwa *ratcheting* terjadi ketika terdapat variansi positif pada kinerja dan anggaran, dimana terjadi perubahan anggaran tahun berikutnya (*overspending*) yang lebih besar dalam menentukan target anggaran. Bias penganggaran, menurut Jones dan Euske (1991), merupakan fenomena jangka panjang yang mempengaruhi *budget actor* anggaran paling tinggi. Agen dapat mengubah anggaran karena hal tersebut serupa dengan klaim yang dibuat oleh (Smith dan Bertozzi, 1996), yang menjelaskan apa yang mempengaruhi besar kecilnya suatu varian anggaran, hal ini terjadi karena agen selalu berupaya untuk memaksimalkan anggaran.

Berdasarkan temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nurhayati (2018), Marlina (2019), serta Fadzilah dan Haryanto (2021), yang semuanya menemukan bahwa variabel independen (*ratchet*) memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap pengeluaran di wilayah Cirebon, Aceh, dan Provinsi Jawa Tengah. Namun penelitian Wotulo (2019) mengklaim bahwa *ratchet effect* tidak berdampak pada anggaran belanja selama proses penyusunan anggaran di Kota Salatiga, Jawa Tengah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti diperoleh hasil bahwa efek *ratchet* terjadi dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah SKPD Jawa Timur baik dalam penganggaran pendapatan daerah maupun belanja daerah. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya perilaku oportunistik dan asymmetric ratchet dalam penyusunan anggaran daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya adalah lokasi penelitian, variabel dalam

penelitian dan periode pengamatan, sehingga akan menimbulkan kelemahan dalam menggambarkan bias secara utuh dalam perilaku penyusunan anggaran.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan lokasi yang lebih luas selain di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel selain variabel *ratchet*, pendapatan dan belanja, misalnya dengan menambah variabel dana perimbangan (Safitri dan Sari, 2020) dan bisa juga menambah variabel belanja modal (Hidayah dan Sari, 2022).
3. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambah periode pengamatan selain periode 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, Suhairi dan Syofriyeni. (2020). Efek *Ratchet* Terhadap Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Se Sumatera. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Sari, Wijaya, Saputra dan Yudha. (2022). Efek *Ratchet* Dalam Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, Vol 9 No 1 Januari 2022 : <https://doi.org/10.30656/Jak.V9i1.3644>.
- Marlina. (2019). Efek *Ratchet* Dalam Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. <http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/1019>.
- Abdullah dan Junita. (2016). Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Fakultas Ekonomi Syiah Kuala*.
- Rahman, Karlina Ghazalah. "Budget Ratcheting pada Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barru." *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1.1 (2022): 1-7.
- Mariani, Mariani, and Vita Fitria Sari. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4.2 (2022): 248-260.
- Febrian Cahyo Pradono & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Universitas Stikubank Semarang*.
- Pendidikan Se-Wilayah Kota Madiun." *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 3.2 (2014): 75-83.
- Sari, P. I. P. (2020, November). EFEK RATCHET DALAM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. In *Seminar Nasional LPPM UPI-YPTK Padang*.
- Baharuddin, Dahlia. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar." *Jurnal Mirai Management* 7.2 (2022): 34-45.
- Arsani, Ade Marsinta, and Pardomuan Robinson Sihombing. "Budget Ratcheting in Indonesia and The Implementation of Performance-Based Budgeting System During Pandemic: Budget Ratcheting in Indonesia and The Implementation of Performance-Based Budgeting System During Pandemic." *Jurnal Mantik* 4.1 (2020): 172-180.
- Junita, Afrah. "The effect of budget variances on the local government budget changes with legislature size as moderator." *The effect of budget variances on the local government budget changes with legislature size as moderator: Junita, Afrah*. 2018.
- Hidayah, Sari dan Aisyah. " Pengaruh *Ratchet* Belanja Modal Terhadap Pendapatan Daerah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4.1 (2022) : 165-177.